

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Visi pembangunan di era reformasi diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.<sup>1</sup>

Perwujudan manusia yang berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Labour Area), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).<sup>2</sup>

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara *kaffah* (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas

---

<sup>1</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Rosda Karya, 2004), 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 9.

pendidikan, yang juga akan berpengaruh pada kualitas lulusannya, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. UNESCO (1984) mengemukakan dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila: pertama, pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*); kedua, belajar seumur hidup (*life long learning*).<sup>3</sup>

Berdasarkan skala TICPI, nampak bahwa negeri ini termasuk “kotor” dan buruk dalam hal korupsi. Selain itu, dari data TICPI juga diketahui bahwa IPK Indonesia sama dengan negara miskin lainnya seperti Ethiopia, Togo, Zimbabwe, Burundi, Azerbaijan, Papua New Geunea dan Central African Republic. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara miskin dengan angka korupsi yang sangat tinggi.<sup>4</sup>

Melihat fakta di atas, nampaknya korupsi yang terjadi di negeri ini, kita harus mengakui telah menjadi suatu “kebiasaan”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani

---

<sup>3</sup> Ibid., 5.

<sup>4</sup> Ibid.

melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut.

Maka, ide memasukkan mengemban antikorupsi dalam pendidikan tingkat dasar (SD/SMA) hingga perguruan tinggi (PT/Universitas) sebagaimana digagas KPK belum lama ini patut disikapi secara cerdas. Mengemban transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan tata nilai lainnya, bakal efektif melalui perantara bangku pendidikan. Khususnya, pendidikan dasar (SD-SMP) 9 tahun dan SMA/MA/ SMK).

Diketahui bahwa karakteristik dasar anak didik SD-SMA, tengah menjalani tahapan-tahapan proses psikologis yang sangat dominan pada pembentukan karakternya. Fase remaja (usia SD) diawali dari periode kanak-kanak akhir (*late childhood*) hingga periode dewasa awal (*early adulthood*)

Menurut Zakiah Darajat remaja adalah anak yang ada pada masa transisi (*peralihan*) diantara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir dalam bertindak tetapi bukan orang dewasa yang telah matang, masa ini mulai diperkirakan umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta : H.Masagung,1990), cet. VI, 101.

Kemudian karakter fase psikologis tersebut; anak didik menirukan segenap tata nilai dan perilaku di sekitarnya, mulai masaknya organ-organ seksual, pengambilan pola perilaku dan nilai-nilai baru, idealis dan pementapan identitas diri.

Kemudian jika dalam fase-fase perkembangan psikologis tersebut ditata secara tepat terstruktur maupun bangun nilai kejujuran *plus* antikorupsi, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah dan gerak hidup mereka di masa mendatang. Sementara menurut Jesuit Pendidik Christopher Gleeson SJ dalam *Striking a Balance: Teaching Values and Freedom*, kematangan internalisasi nilai dapat dilihat melalui perpaduan yang tepat dan kompak antara kepala (otak) yang diasah, hati yang ditempa, dan tangan yang dilatih untuk terampil.<sup>6</sup>

Jadi, salah satu upaya jangka panjang untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

---

<sup>6</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 11.

Oleh karena itu, internalisasi kurikulum mesti merambah tiga aspek kecerdasan peserta didik. Yaitu aspek kecerdasan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (psikomotorik). Internalisasi pada aspek kognitif di antaranya melalui pemberian berbagai informasi mengenai KKN, konsekuensi hukum dan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa. Aspek afektif meliputi penumbuhan minat (*interest*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), dan apresiasi (*appreciation*) anti KKN dalam kehidupan. Sementara pada aspek psikomotorik, ditandai dengan peserta didik enggan melakukan KKN dalam bentuk kecil maupun besar (mencontek, manipulasi nilai, dan sebagainya).

Format kurikulum antikorupsi menurut hemat penulis tidak harus mewujud. Sebab banyaknya mata pelajaran yang sudah ada cukup membebani aspek psikologis peserta didik. Ekseksnya, anak didik menjadi tertekan, kurang ada ruang untuk aktualisasi diri serta menemukan makna kehidupan dalam pendidikan. Lebih tepatnya, kurikulum ini menjadi semacam *hidden* kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi, di mana esensi kejahatan serta kejelekan budaya KKN, diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti yang berupa Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembentukan Moral Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kwanyar Bangkalan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disentralisasikan pada masalah diantaranya :

1. Bagaimana manajemen pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan?
2. Bagaimana pembentukan moral siswa di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan?
3. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral siswa di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan manajemen pendidikan anti korupsi di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan.
2. Untuk mendeskripsikan pembentukan moral siswa di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan
3. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral siswa di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama jurusan Kependidikan Islam. khususnya yang berkaitan dengan implementasi manajemen pendidikan anti korupsi di sekolah. Di samping itu, bermanfaat dalam upaya pengembangan mutu dan hasil pembelajaran.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara akademik dapat menambah referensi bagi mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Menambah pengalaman dan ilmu bagi penulis dan pihak lain mengenai kepemimpinan kiai dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
- c. Bagi peneliti guna memenuhi salah satu persyaratan lulus program strata satu dan memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam.

## 3. Secara Institusional

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi manajemen pendidikan anti korupsi di sekolah.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Implementasi

Proses perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud penulis di sini, pelaksanaan adalah melaksanakan program tersebut agar dapat mempengaruhi para siswa, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan lebih jauh lagi dapat mencapai tujuan pendidikan.

### 2. Manajemen

Manajemen adalah suatu bentuk pekerjaan dan orang yang bertanggungjawab melakukan pekerjaan itu adalah pimpinan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, pimpinan melaksanakan berbagai kegiatan yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah diantaranya adalah perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Henri Fayol mengemukakan 5 (lima) fungsi-fungsi manajemen, yaitu : Perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya Gullick dan Urwick dengan akronimnya PODSCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Bidgetting*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 554.

<sup>8</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 22.

Dalam penelitian ini, teori fungsi-fungsi manajemen yang digunakan penulis adalah sebagaimana yang dikemukakan GR. Terry, meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

### 3. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.<sup>9</sup>

### 4. Moral

Pengertian moral menurut istilah banyak dipaparkan oleh berbagai Ulama', yang kesemuanya memiliki keragaman pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti Ibnu Maskawaih berpendapat bahwa moral merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan. Abdullah Dirros dalam menegaskan, moral adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang

---

<sup>9</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

mantap, dimana keduanya saling berkombinasi membawa kecenderungan pemilihan pada sesuatu yang benar ataupun yang salah<sup>10</sup>.

Menurut Imam Al-Ghozali moral ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifatnya itu timbul perbuatan- perbuatan dengan mudah, dengan tidak menggunakan pertimbangan pikiran (terlebih dahulu).<sup>11</sup> Sedangkan menurut definisi Ahamad Amin yang dimaksud moral adalah ‘*adalatul irodah*’ atau kehendak yang dibiaskan, dalam artian yang lain moral merupakan kehendak yang dibiasakan, sedangkan kehendak sendiri merupakan ketentuan dari beberapa keinginan yang pasti. Dalam pemahaman yang lain antara Imam ghozali dengan Ibnu Maskawaih, terlihat sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Dimana pendapat yang pertama lebih menekankan pada pengertian , bahwa moral merupakan sesuatu dalam jiwa manusia, yang hal tersebut tentunya membawa sesuatu pula dalam jiwa manusia yang kemudian dapat disebut moral. Inilah moral asli yang dibawa manusia dari sejak lahir ke dunia ini, akan tetapi juga terdapat moral yang bukan dibawa sejak lahir tetapi akibat adanya kebiasaan dalam kehidupan manusia tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., 109.

<sup>11</sup> Muhammad Jamaluddin Qosimi, *Mauidhotul Mu'minin* (Libanon: Darul Kitab Al Islami, 2005), juz 2, 15.

<sup>12</sup> Mannan Idris, dkk, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2006), 108.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dibagi atas lima bab, setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi konseptual serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, terminologi korupsi antikorupsi, meliputi: definisi anti korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi. Sub bab kedua, pendidikan korupsi, meliputi: pengertian manajemen pendidikan korupsi, urgensi pendidikan korupsi, nilai-nilai manajemen pendidikan antikorupsi. Sub bab ketiga menguraikan tentang moral siswa.

Bab III Pada bab ini berisi tentang metode penelitian.

Bab IV Paparan dan Analisis Hasil Penelitian. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang menguraikan objek penelitian, yakni : sejarah berdirinya SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan, letak geografisnya, dan segala sesuatu yang terkait dengan objek penelitian tersebut. Selanjutnya dipaparkan tentang implementasi manajemen pendidikan anti korupsi dalam pembinaan moral di SMK Negeri 1 Kwanyar Bangkalan

Bab VI Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.